

## **Analisis Strategi Nuklir Korea Utara Pasca Perang Dingin: Pengaruh Proliferasi Nuklir Korea Utara Terhadap Stabilitas Keamanan Asia Timur**

**Reza Adam**

Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia  
zadamism@gmail.com

### **Abstract**

*Studies related to international security that focus on conflict issues, military strategy and nuclear weapons became relevant during the ongoing Cold War. However after the Cold War, issues such as nuclear strategy were no longer a major problem, instead issues like economic, technological, social and human rights became more relevant. Thus, the urgency of describing North Korea's post-Cold War nuclear strategy and it's impacts on security stability in East Asia is an interesting discussion. This study aims to describe how North Korea's nuclear strategy post-Cold War and how it affects the security stability of East Asia. Method applied is qualitative with a case study approach which will be analyzed using the deterrence theory and security dilemma. The results of the research show that North Korea's post-Cold War nuclear strategy has affected security stability in the East Asia region, which is shown from the responses of Japan, South Korea, and China which experienced a security dilemma from North Korea's nuclear proliferation deterrence. North Korea's post-Cold War nuclear strategy by carrying out nuclear proliferation ultimately created a security dilemma in the East Asian region.*

**Keywords: Nuclear Proliferation; Nuclear Deterrence; North Korea; Cold War; East Asia; Security Dilemma**

### **Abstrak**

Studi terkait keamanan internasional yang berfokus pada isu-isu konflik, strategi militer dan senjata nuklir menjadi relevan pada saat Perang Dingin masih berlangsung. Namun pasca Perang Dingin, isu seperti strategi nuklir tidak lagi menjadi isu utama, melainkan masalah-masalah seperti ekonomi, teknologi, sosial, dan Hak Asasi Manusia menjadi lebih relevan. Untuk itu, urgensi akan penggambaran terkait bagaimana strategi nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin dan pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur menjadi pembahasan yang menarik untuk kemudian dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana strategi nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin dan bagaimana pengaruhnya terhadap stabilitas keamanan Asia Timur. Metode yang diterapkan dalam riset ini ialah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang akan dianalisis dengan teori deterensi dan dilema keamanan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin telah mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Asia Timur, yang ditunjukkan dari respon Jepang, Korea Selatan, dan China yang mengalami dilema keamanan dari deterensi proliferasi nuklir Korea Utara. Strategi nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin dengan melakukan proliferasi nuklir pada akhirnya menciptakan kondisi dilema keamanan di wilayah Asia Timur.

**Kata Kunci: Proliferasi Nuklir; Deterensi Nuklir; Korea Utara; Perang Dingin; Asia Timur; Dilema Keamanan**

## Pendahuluan

Strategi nuklir tidak berbeda dari bentuk strategi militer lainnya karena melibatkan sarana militer untuk tujuan politik. Namun, dalam hal ini, sarana militer yang dipermasalahkan begitu kuat dan destruktif sehingga diragukan apakah tujuan politik yang sangat penting dapat dipenuhi dengan penggunaannya. Di sisi lain, penggunaan senjata nuklir terhadap lawan yang sama-sama diberkahi akan menghasilkan pembalasan yang sama merusaknya. Oleh karena itu, isu sentral untuk strategi nuklir adalah bagaimana memenangkan dan melancarkan perang nuklir, dibandingkan dengan hanya untuk bersiap melakukannya akan tetap menimbulkan efek jera (Peters, Anderson, & Menke, 2018).

Adapun tujuan minimum dari strategi nuklir pada saat Perang Dingin adalah untuk mencegah penggunaan nuklir lainnya, dan secara maksimumnya adalah mencegah agresi apapun, dengan alasan bahwa setiap permasalahan atau permusuhan dapat menciptakan keadaan ekstrim, dimana pengekan terhadap penggunaan nuklir akan hilang. Tujuan maksimum itu, yang telah diadopsi oleh kedua negara adikuasa (Amerika Serikat dan Uni Soviet) selama periode Perang Dingin, memerlukan perhatian khusus pada hubungan strategi yang lebih konvensional dan juga dengan konteks politik yang lebih luas, termasuk dalam pembentukan aliansi dan disintegrasi (Peters et al., 2018).

Strategi nuklir pada saat Perang Dingin berfokus pada Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai negara adidaya ketika itu. Sebagai gambaran, strategi nuklir Amerika Serikat berfokus pada proliferasi senjata dan pembentukan triad nuklir yang terdiri dari; pengebom jarak jauh, rudal jarak jauh, dan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam. Persenjataan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai strategis atau taktis, dimana bom, *Intercontinental Ballistic Missiles* (ICBMs) dan *Submarine-Launched Ballistic Missiles* (SLBMs) merupakan contoh persenjataan strategis yang digunakan untuk menargetkan negara musuh dari jarak antar benua (Octamaya et al., 2022)

Namun, ahli strategi nuklir pada masa Perang Dingin kurang memperhatikan konteks yang lebih luas karena kontinuitas konflik Timur-Barat yang luar biasa, dengan dua aliansi yang masing-masing didominasi oleh negara adidaya seperti *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) oleh Amerika Serikat (AS), dan *Warsaw Pact* oleh Uni Soviet. Strategi nuklir kemudian mulai dikaitkan dengan lebih banyak pertanyaan teknis yang memiliki relevansi dengan kemampuan berbagai sistem senjata, dan berbagai bentuk interaksi potensial (Miller, 2020). Dengan berakhirnya Perang Dingin, sebagian besar skenario menjadi diperdebatkan, menimbulkan pertanyaan apakah masih ada peran untuk strategi nuklir. Jawabannya tampaknya terletak pada bagaimana konsekuensi dari proliferasi nuklir masuk ke dalam sistem internasional yang jauh lebih kompleks.

Perjanjian non-proliferasi senjata nuklir atau yang dikenal dengan *Non-Proliferation Treaty* (NPT) adalah perjanjian internasional yang bertujuan mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata, untuk mempromosikan kerjasama dalam penggunaan energi nuklir secara damai dan untuk memajukan tujuan mencapai pelucutan nuklir dan senjata umum secara menyeluruh (Dreicer & Pregonzer, 2014). Perjanjian tersebut merupakan satu-satunya komitmen yang mengikat dalam bentuk multilateral yang bertujuan untuk pelucutan senjata oleh negara-negara senjata nuklir. Terbuka untuk dipersetujui pada tahun 1968, perjanjian ini mulai berlaku pada tahun 1970. Pada tanggal 11 Mei 1995, kesepakatan itu diperpanjang tanpa batas waktu. Sebanyak 191 negara telah tergabung dalam traktat tersebut, termasuk lima negara senjata nuklir.

Korea Utara menyetujui NPT pada tanggal 12 Desember 1985, tetapi tidak menyelesaikan *safeguard agreement* atau perjanjian perlindungan dengan *International Atomic Energy Agency* (IAEA). IAEA adalah badan pengaman dari perjanjian NPT yang digunakan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap perjanjian melalui inspeksi (Ha

& Hwang, 2015). Hingga pada tanggal 10 Januari 2003, Korea Utara mengumumkan bahwa pihaknya telah menarik diri dari NPT, dan penarikan tersebut membuatnya bebas dari kekuatan mengikat perjanjian itu (Winters, 2005). Sejak saat itulah kemudian Korea Utara memulai strategi nuklir, tepatnya pada percobaan senjata nuklir pertama di tahun 2006.

Percobaan senjata nuklir Korea Utara tentunya memiliki dampak terkait ekonomi, militer atau keamanan terhadap negara-negara di Asia Timur seperti halnya Korea Selatan, Jepang, dan China ataupun Amerika Serikat secara tidak langsung. Masing-masing dari negara tersebut memiliki respon tersendiri dalam menanggapi proliferasi persenjataan nuklir Korea Utara, yang mana dalam hal ini penulis mengangkat tersakit pengaruh percobaan senjata nuklir terhadap isu keamanan dari ketiga negara tersebut.

Delpech mempertanyakan dengan ekstrim dalam tulisannya terkait bagaimana kemudian suatu negara kecil yang bahkan tidak mampu memberi makan rakyatnya sendiri, mampu mengancam negara-negara adikuasa selama lebih dari 15 tahun. Dengan membangun dan meluncurkan setidaknya 12 rudal balistik dan roket antara tahun 2008 dan 2010, serta melakukan uji coba senjata nuklir. Semua itu dilakukan tanpa kemudian Korea Utara menjadi sasaran selain sanksi ekonomi ringan dan peningkatan kerjasama militer antara Amerika Serikat, Korea Selatan, serta Jepang. Untuk itu, penting sekiranya untuk membahas 'strategi nuklir' yang dilakukan oleh Korea Utara (Delpech, 2013).

Lalu literatur terdahulu yang dikerjakan oleh Octamaya membahas terkait taktik nuklir dari Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat Perang Dingin. Selama perang dingin, pertumbuhan yang cepat dari persenjataan nuklir dari kedua negara tersebut tidak semata menjadi ancaman pembalasan, melainkan mereka didorong oleh penargetan balasan dari kekuatan sektor ekonomi, sosial, dan militer satu sama lain. Untuk itu terlepas dari perjanjian *Intermediate-Range Nuclear Force* (INF), Amerika Serikat dan Uni Soviet tetap mempertahankan tingkat kesiapan nuklir yang tinggi (Octamaya et al., 2022). Perlu diketahui bahwa perjanjian INF secara sederhana merupakan perjanjian antara Amerika Serikat dan Uni Soviet tentang penghapusan rudal jarak menengah dan jarak pendek mereka. Mahnken dan Menon juga menggambarkan mengenai strategi nuklir India. Mereka berpendapat tentang keputusan pada senjata nuklir dipicu oleh campuran retorika politik dan politik organisasi yang terjadi dalam kekosongan strategis (Mahnken & Menon, 2001).

Berdasarkan beberapa literatur terdahulu menunjukkan bagaimana strategi atau taktik nuklir dari setiap negara memiliki motif dan dipicu oleh berbagai faktor. Untuk itu dalam hal tersebut posisi penulis dalam penelitian ini ialah ingin menggambarkan bagaimana strategi nuklir yang diterapkan oleh Korea Utara pasca perang dingin, dengan studi kasus pengaruh percobaan nuklir Korea Utara terhadap keamanan di Jepang dan Amerika Serikat. Urgensi yang melatarbelakangi penulisan ini adalah penerapan strategi nuklir yang dilakukan pasca Perang Dingin merupakan suatu kasus yang menarik, lantaran dengan berakhirnya Perang Dingin, isu nuklir kemudian dirumuskan dalam sebuah perjanjian anti proliferasi nuklir.

Lebih lanjut fokus dalam riset ini adalah menggambarkan bagaimana kemudian fenomena strategi nuklir yang diterapkan oleh Korea Utara pasca penarikan diri NPT. Urgensi pemilihan Korea Utara sebagai aktor dalam penelitian ini lantaran negara tersebut telah mengklaim melakukan berbagai percobaan senjata nuklir yang menciptakan dilema keamanan bagi wilayah Asia Timur khususnya pada Korea Selatan, Jepang, dan China. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis akan mengangkat suatu rumusan masalah yaitu; 'bagaimana pengaruh proliferasi nuklir Korea Utara terhadap stabilitas keamanan di wilayah regional Asia Timur?'

## Metode

Jenis penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini ialah Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data secara garis besar merujuk pada data sekunder dengan instrumen penelitian studi literatur, dengan mengambil sumber dari berbagai macam penelitian ilmiah, jurnal, dan buku. Dalam menganalisis data penulis menggunakan teori deterensi nuklir untuk kemudian menggambarkan bagaimana strategi nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin, serta konsep dilema keamanan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh proliferasi nuklir Korea Utara terhadap stabilitas keamanan di Asia Timur.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Sejarah Singkat Program Proliferasi Nuklir Korea Utara

Sebelum membahas lebih jauh terkait bagaimana strategi deterensi nuklir Korea Utara, penting sekiranya untuk kemudian membahas sistem pemerintahan atau politik dari negara tersebut. Sejak berdirinya pada tahun 1948, Republik Rakyat Demokratik Korea (selanjutnya disebut Korea Utara) telah diperintah oleh tiga orang dari generasi keluarga Kim yang terdiri dari; Kim il-Sung, Kim Jong-il dan Kim Jong-un. Secara khusus rezim Kim-il sung bertahan selama kurang lebih 45 tahun dan 10 bulan terhitung sejak 1948 sampai 1994, periode yang sangat lama bahkan dari standar global. Lantaran Korea Utara mempertahankan ideologi ‘sosialis’ bahkan setelah Perang Dingin, kekuasaan rezim Kim il-sung berhasil diteruskan kepada pemerintahan Kim Jong-il dari 1994-2011 lalu kemudian kepada pemerintahan Kim Jong-un sejak 2011-sekarang (Delury, 2022).

Sistem politik Korea Utara sejak tahun 1980-an dapat digambarkan dengan baik dalam konsep ‘Suryong (pemimpin) sistem’. Sistem tersebut mengacu pada sistem yang bertujuan untuk mengabadikan pedoman pemimpin melalui suksesi turun-temurun dalam konteksnya saat ini (Kim, 2008). Hal yang kemudian digarisbawahi pada sistem Suryong itu ialah bahwa meskipun berakar pada kediktatoran Sosialis Leninisme, namun ia didasarkan pada ideologi Juche Korea Utara dimana Suryong telah menggantikan partai sebagai inti politik kepemimpinan. Secara garis besar ideologi Juche diartikan bahwa manusia ialah penguasa segala sesuatu dan memutuskan segalanya, dimana sebuah kesadaran ideologis menentukan tingkah laku manusia di perkembangan sejarah (Makhroja, 2020).

Adapun salah satu ciri utama dari Leninisme ialah posisinya sebagai ‘partai pelopor’ yaitu sebagai agen utama dari kediktatoran proletariat yang cenderung mengarah kepada kediktatoran pribadi. Lebih lanjut berdasarkan prinsip dasar manusia yang menjadi inti utama ideologi Juche, manusia ataupun individual didefinisikan sebagai makhluk sosial yang diberkahi dengan kualitas kemandirian dan kreativitas. Namun meskipun individu dianggap sebagai ‘makhluk sosial’, hanya melalui tindakan sosial yang tepat mereka dapat mengekspresikan kemampuan kemandirian serta kreativitasnya. Menurut ideologi Juche ini proses tersebut membutuhkan kepatuhan tanpa syarat dan mutlak kepada ‘bimbingan’ Suryong sebagai pemimpin tertinggi masyarakat. Bahkan ideologi memiliki dogma agama bahwa individu dapat melampaui batas-batas kehidupan fisik dan mencapai kehidupan sosial-politik yang abadi lewat ketaatan pada petunjuk dari pemimpin (Shin, 2016).

Selain itu isu nuklir dari Korea Utara mulai tersohor pada akhir 1980-an dan awal 1990-an lantaran dengan berakhirnya hubungan aliansi Perang Dingin mereka, serta dihadapkan dengan tantangan yang tak tertandingi untuk kelangsungan hidup rezim yaitu tepatnya mencari keamanan melalui persenjataan nuklir dari Amerika Serikat. Korea Utara secara aktif terlibat dalam program penelitian nuklir pada 1950-an, ketika ia mulai

khawatir akan tertinggal dari Korea Selatan. Ia menyetujui program pembangunan damai dengan Uni Soviet untuk membangun infrastruktur nuklir. Uni Soviet memutuskan untuk membantu membangun dan mendirikan reaktor nuklir di Yongbyong, yang nantinya akan menjadi pusat kekhawatiran Amerika Serikat terkait perkembangan nuklir di Semenanjung. Namun, penarikan rudal Uni Soviet dari Kuba pada akhir *Cuban Missile Crisis* 1962 membuat rezim Korea Utara khawatir akan kemungkinan ditinggalkan oleh pelindung negara adidaya (Uni Soviet). Oleh karena itu persenjataan nuklir semakin dilihat sebagai cara untuk menjamin keamanan dari Korea Utara (Fouse, 2004).

Terdapat sejarah yang lebih jauh terkait kesadaran Korea Utara mengenai senjata nuklir, dan minatnya pada ilmu pengetahuan serta teknologi nuklir yang bahkan mendahului pembentukan negara itu sendiri pada 1948. Rezim Kim il-Sung sebagai pemimpin pertama Korea Utara belajar dari pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki, bahwa dua senjata atom tersebut dapat memaksa suatu negara besar untuk menyerah (Jepang). Akan tetapi baru pada tahun 1970-an Korea Utara memulai program senjata nuklir dengan sungguh-sungguh, dimana pada saat situasi tersebut Kim il-Sung terdorong oleh rasa tersaingi terkait perkembangan ekonomi Korea Selatan. Dimana hal tersebut mengakibatkan adanya kebutuhan yang berkelanjutan akan pengamanan kemerdekaan Pyongyang dari Beijing dan Moskow, serta keinginan untuk meninggalkan warisan bagi penerus dan putranya yakni Kim Jong-il. Pada tahun 1980, Korea Utara mampu membangun reaktor nuklir yang dapat menghasilkan plutonium di tingkat senjata (Panda, 2020).

Pada saat Amerika Serikat mulai menganggap serius terkait program nuklir Korea Utara, proliferasi akan strategi deterensi nuklir telah berakar dalam sistem Korea Utara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila tidak ada keterlibatan mendalam Amerika Serikat yang nyata dengan Korea Utara terhadap senjata nuklir sampai pada tahun 1990-an, serta hanya sedikit yang menunjukkan bahwa perlawanan terhadap Amerika Serikat merupakan urgensi utama Korea Utara dalam mengembangkan strategi deterensi nuklirnya (Panda, 2020). Berdasarkan pemaparan terkait bagaimana kemudian inisiasi teknologi nuklir Korea Utara secara historis, membuka pandangan mengenai urgensi negara tersebut dalam mengembangkan program nuklir yang dapat dilihat dari banyak sisi. Salah satunya yakni dapat dilihat dengan menggunakan kaca mata strategi deterensi nuklir.

## **2. Percobaan Ledakan Nuklir Korea Utara**

Program strategi nuklir Korea Utara sejak tahun 1990- an hingga sekarang dinilai telah mampu mempersenjatai Plutonium dan Uranium. Serangkaian enam uji coba ledak nuklir bawah tanah telah dilakukan dengan masing-masing dari uji coba ledak nuklir tersebut menghasilkan hasil yang lebih tinggi (Pasyanos & Myers, 2018). Korea Utara mendeklarasi telah melakukan enam uji coba ledakan nuklir bawah tanah terhitung dari tahun 2006 hingga 2017 yang dilakukan di lokasi uji coba Punggye-ri. Sebagai tambahan uji coba ledak nuklir pertama terjadi pada 9 Oktober 2006, lalu yang kedua pada 25 Mei 2009 dan ketiga pada 12 Februari 2013, kemudian yang keempat pada 6 Januari 2016 yang tak lama disusul uji ledak kelima pada 9 September 2016 di tahun yang sama. Hingga pada percobaan uji ledak nuklir yang terakhir terjadi pada 3 September 2017, dimana semua uji ledak tersebut didemonstrasikan di situs uji coba Punggye-ri (Voytan, Lay, Chaves, & Ohman, 2019).

Ledakan pertama uji coba perangkat nuklir dilakukan pada 9 Oktober 2006 di terowongan bawah tanah yang digali ke situs pegunungan terpencil bernama Punggye-ri, yang berlokasi di bagian timur laut Korea Utara. Perangkat ledak nuklir itu diasumsikan menggunakan plutonium yang sumbernya diyakini berasal dari fasilitas nuklir Korea

Utara di Yongbyon (Burns & Coyle III, 2015). Adapun hasil uji coba ledak nuklir plutonium yang rendah awalnya menimbulkan pertanyaan terkait apakah itu memang ledakan nuklir atau bukan, namun deteksi isotop radioaktif di udara oleh pesawat militer Amerika Serikat telah mengkonfirmasi bahwa itu memang ledakan nuklir. Lalu pada 14 Oktober 2006 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DKPBB) dengan suara bulat menyetujui sanksi militer dan ekonomi terbatas terhadap Korea Utara. Kelima anggota tetap dari DKPBB yaitu Amerika Serikat, Tiongkok, Russia, United Kingdom dan Prancis menyatakan bahwa sanksi yang tertuang dalam Resolusi DKPBB 1718 dimaksudkan untuk menghukum rezim Korea Utara, bukan penduduk negara tersebut.

Percobaan ledak nuklir kedua dilakukan pada 25 Mei 2009 di Mantapsan di sekitar Punggyri yang merupakan tempat uji coba nuklir pertama juga, dan termasuk ledakan nuklir bawah tanah. Tes tersebut dilakukan setelah sebuah pesan yang menyatakan bahwa Korea Utara telah membuat hulu ledak mini untuk rudal jarak menengah, serta negara itu telah diakui oleh para analis sebagai tenaga nuklir yang lengkap (Kristensen & Korda, 2022). Uji coba ledak nuklir kedua ini hampir secara universal dikecam oleh komunitas internasional dimana DKPBB mengadopsi resolusi 1874, yang memberlakukan sanksi ekonomi lebih lanjut terhadap Korea Utara dan memberi wewenang kepada negara-negara anggota PBB untuk memeriksa kargo negara tersebut dan menghancurkan bahan apapun yang berhubungan dengan program nuklir.

Hingga pada 12 Februari 2013 media Korea Utara *Korea Central News Agency* (KCNA) mengumumkan telah melakukan uji coba ledak nuklir bawah tanah yang ketiga selama tujuh dari percobaan kedua. Menanggapi uji coba ledak ketiga tersebut, pemerintah Jepang mengadakan pertemuan darurat PBB dan Korea Selatan menaikkan status siaga militernya. Tidak diketahui apakah ledakan itu nuklir atau ledakan konvensional yang dirancang untuk menyerupai ledakan nuklir. Dalam dua hari sejak ledakan, penyelidik dari Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan gagal dalam mendeteksi radiasi apapun (Smith, 2016).

Lebih lanjut Korea Utara melakukan percobaan peledakan nuklir keempatnya pada 6 Januari 2016 di situs uji coba nuklir Punggyri secara bawah tanah. Media Korea Utara membuat pengumuman bahwa rezim telah berhasil menguji bom hidrogen, dimana pemerintahnya menggambarkan uji coba tersebut sebagai keberhasilan total dan menyebutnya sebagai bentuk pertahanan diri melawan Amerika Serikat. Di tahun yang sama tepatnya pada 9 September 2016 Korea Utara yang bertepatan dengan Hari Peringatan berdirinya Korea Utara, uji coba ledakan nuklir kelima telah dilakukan di Punggyri. Hal yang kemudian paling menarik perhatian oleh pengamat internasional dari uji coba ledak kelima ini ialah pernyataan dari Institut Senjata Nuklir Korea Utara, yang menyatakan bahwa tes tersebut pada akhirnya dapat mengkonfirmasi hulu ledak nuklir yang telah distandarisasi untuk dipasang di roket balistik (Mariani, 2017).

Uji coba ledak senjata nuklir keenam Korea Utara dilakukan pada 3 September 2017 sekaligus mengumumkan bahwa percobaan tersebut ialah bom hidrogen yang berhasil ditempatkan pada ICBM. Daya ledak bom nuklir tersebut dilaporkan setidaknya lima kali lebih besar dari percobaan nuklir kelima sebelumnya. Ledakan percobaan senjata nuklir pada tahun 2017 ini merupakan ledakan dengan penaksiran yang terbesar dari uji coba-uji coba sebelumnya (Hastings, Lee, & Kelley, 2018).

Korea Utara menguji senjata nuklirnya yang paling kuat dan menghadirkan tantangan tersbesarnya kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada saat itu, serta mengancam akan meningkatkan ketegangan dengan Washington. Hal tersebut merupakan uji coba nuklir keenam bagi negara itu dan yang pertama selama pemerintahan Trump. Beberapa jam sebelumnya, KCNA merilis foto-foto pemimpin negara Kim Jong-Un yang sedang melihat muatan bom hidrogen ke rudal balistik antarbenua yang secara

teoritis dapat menghantam sebagian besar kota-kota di Amerika Serikat. Fenomena tersebut mendorong pemerintahan Trump untuk kemudian memperingatkan bahwa ancaman untuk menggunakan senjata seperti itu terhadap AS dan sekutunya, akan disambut dengan tanggapan militer besar-besaran. Namun setelah seharian pertemuan di *Situation Room* yang melibatkan Trump dan penasihatnya, dua panggilan telepon antara Presiden dan Perdana Menteri Shinzo Abe dari Jepang mendorong agar menuntut untuk memotong pasokan energi Korea Utara (Choi, 2019).

Korea Utara telah membuat kemajuan teknologi dalam program senjata nuklirnya melalui enam kali uji coba nuklir tercatat hingga saat ini, dimana berbagai bentuk uji tembak seperti rudal balistik dan peluncuran tes rudal balistik kapal selam, serta yang terakhir ialah bom hidrogen yang dapat dimuat ke dalam ICBM. Selama kemampuan nuklirnya meningkat, Korea Utara juga meningkatkan strategi deterensinya. Strategi nuklir deterensi biasanya berhubungan dengan bagaimana kemudian menggunakan ancaman yang melibatkan senjata nuklir pada bidang militer dan diplomatik, termasuk apa yang menjadi objek deterensi, jenis serangan apa yang harus dicegah, serta bagaimana menyebarkan senjata dan apa target serangannya.

### **3. Pengaruh Proliferasi Nuklir Korea Utara Terhadap Keamanan Jepang**

Berbicara mengenai kondisi pertahanan Jepang, maka erat kaitannya dengan upaya yang telah dilakukan Jepang dalam pengamanan stabilitas masyarakat internasional melalui kegiatan diplomasi termasuk dalam usaha mencegah dan menyelesaikan konflik, untuk membangun dasar keamanan yang kuat dengan stabilitas politik dalam negeri. Selain itu juga menjaga pengaturan keamanan antara Jepang dan Amerika Serikat serta untuk membangun kemampuan pertahanan yang sesuai, Jepang membentuk *National Defense Program Outline* (NDPO) pada 1976. Semenjak itu Jepang telah mengembangkan kemampuan pertahanannya berdasarkan outline tersebut, dan upaya pertahanan yang stabil sehubungan dengan keberadaan pengaturan keamanan Jepang-Amerika Serikat dalam memastikan implementasi pengaturan ini agar lancar dan efektif (Bisley, 2008).

Namun dengan berakhirnya Perang Dingin, maka NDPO diperbarui pada 1995 dengan seperangkat pedoman baru untuk kemampuan pertahanan Jepang. Dengan pertimbangan bahwa situasi internasional telah mengalami perubahan yang signifikan, termasuk berakhirnya konfrontasi kekuatan militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Lebih lanjut berbagai masalah teritorial dan konfrontasi yang berakar pada perbedaan agama dan etnis semakin menonjol. Bahkan proliferasi senjata pemusnah massal seperti senjata nuklir dan peluru kendali semakin meningkat.

Lebih lanjut dengan berakhirnya Perang Dingin, harapan akan peran dari *Self-Defense Force* (SDF) telah ditingkatkan dalam memberikan bantuan terkait bencana skala besar dan berkontribusi untuk membangun lingkungan keamanan yang lebih stabil melalui partisipasi dalam kerjasama perdamaian internasional, selain misi utama mereka membela Jepang. Jepang dengan mengikuti pedoman tersebut untuk meningkatkan kredibilitas kerjasama keamanan Jepang-Amerika Serikat guna memastikan pertahanan nasionalnya sendiri, serta berkontribusi pada perdamaian dan stabilitas komunitas internasional (Nakato, 2013).

Selain itu, kemampuan pertahanan Jepang memiliki tiga peran yaitu pertahanan nasional, tanggapan terhadap bencana skala besar dan berbagai situasi lainnya, serta berkontribusi dalam menciptakan lingkungan keamanan yang lebih stabil (Przystup, 2015). Pertahanan nasional berbicara mengenai pencegahan agresi terhadap Jepang bersama dengan kerjasama keamanan Jepang-Amerika Serikat, dengan memiliki kemampuan pertahanan dalam skala yang sesuai yang diperlukan untuk pertahanan sesuai

dengan karakteristik geografis Jepang. Lalu mempertimbangkan kemampuan militer negara-negara tetangga dengan memastikan sikap untuk sepenuhnya memanfaatkan kemampuan untuk mempertahankan negara. Melawan ancaman senjata nuklir, mengandalkan deterensi nuklir Amerika Serikat, secara aktif bekerja dalam upaya internasional untuk pelucutan senjata nuklir seperti halnya ancaman dari proliferasi persenjataan nuklir Korea Utara dari percobaan ledakannya tersebut .

Menanggapi terkait proliferasi persenjataan nuklir Korea Utara atau lebih tepatnya mengenai percobaan ledakan senjata nuklirnya, pemerintah Jepang terdorong untuk kemudian melakukan proliferasi ataupun redefinisi tentang pedoman kerjasama keamanan antara Jepang-Amerika Serikat seperti yang telah tercantum dalam NDPO 1995. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disebutkan dalam NDPO 1995 terkait situasi internasional dimana terdapat ancaman senjata nuklir dari percobaan ledakan nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin. Lebih lanjut redefinisi tersebut pada akhirnya membentuk *The Guidelines for Japan-U.S. Defense Cooperation* 1997 yang bertujuan untuk menciptakan landasan yang kuat akan kerjasama Jepang-Amerika Serikat agar lebih efektif (Przystup, 2015).

Dokumen 1997 secara garis besar menggarisbawahi bahwa Jepang memegang tanggung jawab yang lebih besar akan keamanannya sendiri, dimana negara tersebut dapat berperan lebih aktif dalam tindakan atau sikap tertentu terhadap situasi. Terdapat tiga prinsip utama yang termuat dalam pedoman kerjasama pertahanan Jepang-Amerika Serikat 1997 yang terdiri dari; (a) Hak dan kewajiban berdasarkan Traktat Kerjasama dan Keamanan antara Amerika Serikat dan Jepang dan pengaturan terkaitnya serta kerangka dasar aliansi mereka tidak akan berubah, (b) Jepang akan melakukan semua tindakannya dalam batas-batas konstitusi yang sesuai dengan posisi dasar seperti pemeliharaan kebijakan berorientasi pada pertahanan eksklusif dan tiga prinsip non-nuklirnya, dan (c) semua tindakan yang diambil oleh Amerika Serikat dan Jepang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum internasional, termasuk penyelesaian sengketa secara damai dan kesetaraan kedaulatan, serta perjanjian internasional yang relevan seperti Piagam PBB (Akaha, 2005).

Lebih lanjut, Jepang berkewajiban untuk menyediakan suplai serta transportasi untuk pasukan militer Amerika Serikat yang terlibat dalam kondisi konflik dalam pedoman kerjasama tersebut. Tepatnya terdapat tiga kerjasama keamanan yang termuat dalam pedoman kerjasama pertahanan Jepang-Amerika Serikat 1997 yakni kerjasama dalam situasi normal, tindakan ataupun respon apabila terdapat serangan bersenjata kepada Jepang, dan kerjasama dalam kondisi yang mempengaruhi perdamaian serta keamanan Jepang. Selain itu ia juga membahas mengenai kerjasama terkait penanganan isu regional dan global, dimana kedua negara bekerjasama dalam meningkatkan lingkungan keamanan di Asia Pasifik secara regional (termasuk masalah nuklir Korea Utara) (Akaha, 2005). Berdasarkan pemaparan sebelumnya menunjukkan bahwa respon atau tindakan yang dilakukan pemerintah Jepang untuk menjaga stabilitas keamanannya atas proliferasi program nuklir Korea Utara yang diperlihatkan melalui percobaan ledakan senjata nuklir, ialah dengan memperkuat kerjasama pertahanan bersama Amerika Serikat.

#### **4. Pengaruh Proliferasi Nuklir Korea Utara Terhadap Keamanan Korea Selatan**

Secara geografis Korea Selatan dan Korea Utara tertelak berdekatan sehingga proliferasi program nuklir ataupun percobaan ledakan nuklir Korea Utara tentunya mempengaruhi atau bahkan mengancam Korea Selatan, mengingat kedua negara memiliki sejarah yang dalam terutama terkait Perang Korea pada 1950-1953 (Chang-II, 2010). Apabila ditarik dari segi historis secara singkat, salah satu penyebab pecahnya perang tersebut ialah perbedaan politik dan ideologi. Oleh karena itu, kondisi kedua



negara hingga saat ini masih dihadapkan dengan masalah keamanan lantaran program proliferasi persenjataan nuklir Korea Utara yang terus berkembang dan menimbulkan dilema keamanan bagi negara-negara di sekitarnya, terutama Korea Selatan (Badruzaman, Jehan, & Irsadanar, 2020).

Lebih lanjut ketegangan akan proliferasi program nuklir Korea Utara mempengaruhi keamanan Korea Selatan untuk kemudian melakukan permintaan jaminan naungan nuklir dari Amerika Serikat dengan memperkuat kerjasama diantaranya, dan sikap Korea Selatan selanjutnya ialah meningkatkan kemampuan pertahanan konvensionalnya. Pada awal program proliferasi nuklir Korea Selatan pada tahun 1970-an tertarik untuk kemudian melakukan proses ulang bahan bakar bekas yang awalnya dipicu oleh antusiasme global terhadap reaktor plutonium, dan atas pertimbangan pemrosesan ulang sebagai jalur potensial untuk program proliferasi senjata nuklir (Lim, 2019). Pada tahun 1970-an Korea Selatan mulai memikirkan terkait daur ulang plutonium, dimana rencana jangka panjang nuklirnya menuntut akan kelayakan fabrikasi dan pemrosesan ulang bahan bakar nuklir terselesaikan di 1976.

Namun keadaan internasional mengubah rencana awal Korea Selatan, dimana pada tahun 1970 Amerika Serikat mengumumkan rencananya untuk kemudian menarik sebagian pasukannya yang ditempatkan di Korea Selatan. Hal tersebut berdasarkan apa yang dikenal dengan Doktrin Nixon yang berasal dari konferensi pers Richard Nixon selaku Presiden Amerika Serikat di Guam pada 25 Juli 1969, yang diartikulasikan dalam pidatonya terkait Vietnamisasi (Lim, 2019). Sejak doktrin tersebut diumumkan, Amerika Serikat melakukan pengurangan jumlah pasukannya yang ditempatkan di luar negeri, dimana mereka menarik sekitar 20.000 tentara dari Divisi 7 pada tahun 1971 di Korea Selatan (Taylor, Smith & Mazarr, 1990). Pengurangan pasukan Amerika Serikat tersebut merupakan tantangan keamanan yang besar bagi Korea Selatan.

Sepanjang tahun 2017 ketegangan atas program senjata nuklir Korea Utara terus meningkat, terutama pasca Korea Utara melakukan percobaan ledakan senjata nuklir keenamnya pada 6 September 2017. Kejadian tersebut mempengaruhi keamanan Korea Selatan yang berujung pada persenjataan nuklirnya yang muncul kembali sebagai topik di antara media Korea dan didiskusikan secara terbuka.

Politik garis keras seperti pimpinan *Liberty Korea Party* (LKP) telah menyerukan agar Korea Selatan memperoleh senjata nuklir untuk kemudian dapat mengimbangi rezim Korea Utara (Sagan, 1997). Selain itu pimpinan LKP juga bersikeras untuk memindahkan senjata nuklir taktis Amerika Serikat ke Korea Selatan, dimana sejak tahun 1958 Amerika Serikat telah mengerahkan senjata nuklir taktis di Korea Selatan hingga tahun 1991 ketika senjata nuklirnya ditarik dari Korea Selatan (Kristensen & Norris, 2017). Oleh karena itu suara akan persenjataan nuklir Korea Selatan telah meningkat sejak percobaan ledakan nuklir Korea Utara dilakukan, dimana beberapa bagian dari publik Korea Selatan menuntut agar mulai mengembangkan senjata nuklirnya sendiri atau membawa kembali senjata nuklir taktis Amerika Serikat.

Selain itu politisi dan pakar juga berpendapat bahwa Korea Selatan harus diizinkan untuk kemudian melakukan pemrosesan ulang bahan bakar bekas untuk plutonium seperti yang dilakukan Jepang. Hal tersebut akan menempatkan Korea Selatan untuk kemudian memproduksi senjata nuklir lebih cepat. Adapun terkait motivasi atas dukungan terhadap Korea Selatan untuk mengembangkan senjata nuklir yang meliputi mencari kekuatan deterensi yang lebih kredibel, agar Korea Selatan sejajar dengan Korea Utara dalam hal persenjataan nuklir, menekan Amerika Serikat dan China untuk denuklirisasi Korea Utara, dan untuk mengekspresikan rasa frustrasi yang meluas dan ketakutan akan pengabaian (Dalton & Francis, 2015).

Namun dibalik pembahasan mengenai Korea Selatan terkait proliferasi persenjataan nuklir, Moon Jae-In sebagai Presiden Korea Selatan pada saat itu (percobaan ledakan nuklir keenam Korea Utara) menyatakan pada pidatonya di Majelis Nasional pada 1 November 2017 bahwa Korea Selatan tidak akan mengembangkan senjata nuklir dan menekankan untuk denuklirisasi di Semenanjung Korea (Lim, 2019). Di sisi lain, ia memiliki pandangan yang berbeda tentang kapal selam bertenaga nuklir. Selama kampanye kepresidenannya, Moon menyatakan dukungan untuk pengenalan kapal selam bertenaga nuklir serta berjanji akan melakukan upaya agar mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat.

Meskipun di tengah ancaman nuklir dan rudal Korea Utara yang berkembang, Korea Selatan telah memulai studi kelayakan untuk membangun kapal selam bertenaga nuklir. Angkatan Laut Korea Selatan telah menugaskan sebuah lembaga swasta untuk kemudian menemukan cara menyelesaikan pembatasan internasional demi membangun kapal selam nuklir (Campbell, 2021). Lebih lanjut selama Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) bilateral yang diadakan di Seoul 8 November 2017, Presiden Moon berdiskusi bersama Presiden Trump tentang minatnya dalam mengerahkan kapal selam bertenaga nuklir untuk bertahan melawan kapal selam rudal balistik Korea utara. Kedua pemimpin tersebut sepakat untuk memulai konsultasi terkait akuisisi dan proliferasi kapal selam nuklir Korea Selatan.

## **5. Pengaruh Proliferasi Nuklir Korea Utara Terhadap Keamanan China**

Pembahasan mengenai bagaimana kemudian pengaruh proliferasi nuklir Korea Utara terhadap keamanan China menjadi sangat menarik lantaran China memiliki ikatan yang baik dengan Korea Utara secara historis, tepatnya selama Perang Dingin. Kedua negara tersebut telah menjalin hubungan aliansi pertahanan sejak pecahnya Perang Korea pada tahun 1950, dimana secara geopolitik Korea Utara merupakan negara yang strategis bagi China di kawasan Asia Timur. Terlebih keduanya secara bersama memandang kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan tersebut sebagai ancaman. Meski begitu China tetap mempertahankan posisinya dalam menolak proliferasi nuklir Korea Utara, meskipun proliferasi program nuklir Korea Utara ditujukan salah satunya untuk menentang kehadiran militer Amerika Serikat di Korea Selatan (Dwivedi, 2012).

Adapun yang menjadi kekhawatiran China terhadap proliferasi senjata nuklir Korea Utara ialah bagaimana kemudian pengembangan tersebut dapat mengakibatkan efek domino, serta di saat yang sama juga membenarkan Jepang untuk ikut mengembangkan program nuklir ataupun misilnya. Selain itu program proliferasi nuklir Korea Utara juga dapat menimbulkan ketakutan pada para pembuat kebijakan China lantaran akuisi senjata nuklir atau bahkan percobaan ledakan nuklir negara itu dapat memprovokasi adanya intervensi militer dari Amerika Serikat, atau kekuatan lainnya (Hughes, 2007). Secara spesifik hal yang menjadi kekhawatiran dari China akan proliferasi nuklir Korea Utara adalah bagaimana program itu dapat membuat Amerika Serikat, Jepang ataupun Korea Selatan melancarkan serangan terhadap Korea Utara yang menyebabkan pecahnya konflik di Semenanjung Korea (Moore, 2008).

Lebih lanjut ancaman yang diberikan oleh proliferasi nuklir Korea Utara terhadap China ialah bahwa pengembangan tersebut dapat merusak hubungan China bersama komunitas internasional, lantaran tindakan militer internasional atau sanksi komprehensif terhadap Korea Utara. Hal tersebut dapat menempatkan China pada posisi canggung karena harus memilih Korea Utara sebagai sekutu lama dan tetangganya atau komunitas internasional (Sulaiman, 2020).

Perhatian China tentang program pengembangan nuklir Korea Utara yang dapat menyebabkan penataan kembali dalam keseimbangan kekuatan regional antara Jepang,

Korea Selatan atau bahkan Taiwan yang berpotensi menjadikan mereka mengembangkan senjata nuklirnya sendiri juga memberikan ancaman bagi China. Lebih dalam, Jepang dan Korea Selatan yang berpotensi untuk lebih mencari bantuan atau memperkuat kerjasama pertahanan mereka bersama Amerika Serikat juga memberi ancaman kepada China. Sebagai perumpamaan juga bahwa China khawatir apabila proliferasi nuklir Korea Utara terus menekan Jepang sehingga memaksa negara tersebut untuk sepenuhnya mempersenjatai nuklir. Hal tersebut tentunya dapat memberikan lebih banyak dorongan akan kehadiran Amerika Serikat di wilayah Asia Timur, dan dapat memperkuat kembali aliansinya bersama Jepang dan Korea Selatan.

Bahkan China juga sangat prihatin terkait proliferasi nuklir dari Korea Utara dan mungkin Jepang dalam hubungannya bersama Taiwan, mengingat hubungan antara China dan Taiwan yang memiliki konflik panjang yang hingga kini belum menemukan titik terang (Azzara & Sholeh, 2022). Ancaman proliferasi nuklir Korea Utara berpotensi dapat membuat negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, atau Taiwan membutuhkan senjata nuklir juga, yang dapat berujung terjadinya *Arms Race* atau mereka berlomba untuk mengembangkan persenjataan masing-masing di Asia Timur.

Selain Jepang, hal yang mengkhawatirkan China akan proliferasi nuklir Korea Utara terjadi kepada Korea Selatan yang akan mempersenjatai program nuklir juga. Hal tersebut juga telah digambarkan sebelumnya pada bagian Korea Selatan yang menyebutkan bahwa negara tersebut telah memulai proliferasi nuklirnya pada tahun 1970-an, namun diberhentikan oleh Amerika Serikat. Untuk itu, program proliferasi nuklir Korea Utara dapat menekan pemerintah Korea Selatan untuk kemudian melanjutkan persenjataan nuklirnya yang sebelumnya telah berhenti.

Ancaman dalam bentuk ekonomi juga hadir dari proliferasi nuklir Korea Utara yakni potensi serius yang dapat menyebabkan gangguan ekonomi di pasar Asia Timur dan China karena perang, konflik atau sanksi terhadap Korea Utara. Perekonomian China sangat bergantung pada perdagangan, dimana hal tersebut membutuhkan stabilitas terutama terkait tiga dari empat mitra dagang utama China ialah Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan yang juga dipengaruhi oleh program proliferasi nuklir Korea Utara.

Apabila ditelaah dengan menggunakan kacamata teori deterensi, maka strategi nuklir pasca Perang Dingin Korea Utara dengan program proliferasi nuklir yang diperlihatkan dari serangkaian percobaan ledakan nuklirnya ditujukan untuk melakukan deterensi serangan dari Amerika Serikat. Namun lantaran Jepang dan Korea Selatan juga berlindung di bawah naungan nuklir Amerika Serikat maka kedua negara tersebut menjadi target yang ingin ditunjukkan oleh Korea Utara terkait kredibilitas ancaman nuklirnya secara langsung.

Sebagai negara nuklir kecil, Korea Utara mungkin memandang strategi deterensi nuklirnya sebagai '*great equalizer*' atau penyeimbang kuat yang dapat membantunya mengatasi kebijakan extended deterrence dari Amerika Serikat. Kemampuan akan nuklir ini yang menyebabkan masalah lebih lanjut (Puchala, 2000). Program nuklir Korea Utara telah menjadi penyebab kekhawatiran di antara negara tetangganya, terutama Korea Selatan dan Jepang. Adapun komunitas internasional telah bereaksi dengan ketidaksenangan terkait gencarnya uji coba rudal nuklir serta balistik oleh pihak Korea Utara. Oleh karena itu Korea Utara mendapatkan serangkaian sanksi oleh PBB sejak dimulainya program nuklirnya. Terlepas dari berbagai pendekatan dan upaya selama beberapa dekade untuk melakukan denuklirisasi pada Semenanjung Korea, Korea Utara telah mengembangkan persenjataan nuklir dan terus melakukan uji peledaknya yang seperti disebutkan tercatat hingga 3 September 2017 terakhir.

Apabila ditelaah dari makna strategi nuklir ketika Perang Dingin dan setelahnya, terdapat sebuah perluasan makna. Seperti yang telah disinggung di bagian latar belakang

masalah, bahwa semasa Perang Dingin manifestasi dari strategi nuklir itu kurang terkontestasi, lantaran pada masa itu strategi nuklir secara maksimal diterapkan oleh kubu Barat Amerika Serikat, dan Timur Uni Soviet yang berujuan untuk melakukan deterensi agresi dan penggunaan nuklir. Namun, dalam studi kasus ini, terlihat bagaimana kemudian bentuk dari strategi nuklir pasca Perang Dingin yang memiliki konteks yang lebih luas. Dalam hal ini, Korea Utara menjalankannya bukan dengan tujuan deterensi seperti pada saat Perang Dingin, melainkan memaksimalkan potensi penggunaannya sebagai strategi militer, dan secara khusus strategi politik.

Lebih lanjut, melihat respon dari strategi nuklir deterensi Korea Utara, Amerika Serikat yang dipimpin oleh Donald Trump pada saat itu awalnya ingin membalas dengan kekuatan sebesar-besarnya juga. Namun, atas pertimbangan para pemimpin Jepang dan Korea Selatan, akhirnya Amerika Serikat memilih untuk menahan dan lewat DKPBB memberikan sanksi kembali terhadap Korea Utara. Keputusan untuk kemudian tidak melakukan penyerangan balik atau menggunakan kekuatan, dan memutuskan untuk memberi sanksi ekonomi merupakan suatu titik kesuksesan bagi strategi nuklir Korea Utara, lantaran tujuan dari objektif tersebut telah tercapai (Fetter & Wolfsthal, 2018).

Apabila dianalisis dengan menggunakan konsep dilema keamanan, maka tindakan Jepang dalam memperkuat aliansi pertahanan bersama Amerika Serikat, Korea Selatan yang mulai mengembangkan kapal selam bersenjata nuklir dengan bantuan Amerika Serikat, serta China yang menjadi canggung untuk kemudian melakukan respon keamanan ialah bentuk dari dilema keamanan. Dilema keamanan merupakan situasi dimana tindakan yang diambil oleh suatu negara untuk meningkatkan keamanannya menyebabkan reaksi dari negara lain, yang justru mengarah kepada penurunan daripada peningkatan keamanan negara yang menerapkan. Hal tersebut tercermin dalam tindakan Jepang, Korea Selatan dan China dalam menanggapi proliferasi nuklir Korea Utara.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya menunjukkan bahwa proliferasi nuklir Korea Utara pada akhirnya menyebabkan terjadinya dilema keamanan bagi wilayah Asia Timur, khususnya Jepang, Korea Selatan dan China. Ketiga negara tersebut mengalami dilema keamanan sehingga mendorong mereka untuk kemudian melakukan bentuk tindakan sebagai respon akan proliferasi nuklir Korea Utara. Adapun setiap negara memiliki tingkat ataupun bentuk kekhawatirannya masing-masing, dimana secara garis besar berkaitan dengan Amerika Serikat.

## **Kesimpulan**

Perkembangan sebuah strategi merupakan sebuah isu yang menarik untuk dibahas. Studi strategi tentunya bersifat relatif, karena menyesuaikan dengan kondisi yang dirasakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi nuklir pasca masa Perang Dingin, secara empirik masih dilakukan oleh Korea Utara lewat serangkaian uji coba hulu ledak nuklir. Namun manifestasi dari strategi nuklir ini memiliki bentuk yang berbeda yaitu bertujuan lebih untuk menunjukkan sebuah kekuatan dan membawa ancaman. Strategi nuklir yang dipahami juga sebagai strategi militer nyatanya masih dipergunakan terlepas dari sifat destruktifnya. Strategi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara pada berbagai tes percobaan ledakan senjata nuklir adalah dengan menciptakan hulu ledak yang besar dan mengklaim kesuksesan percobaan tersebut lantaran dinilai mampu untuk kemudian meledakkan Amerika Serikat dan sekutunya, yang mana akan memberi pesan yang kuat jika mereka mampu untuk kemudian membuat hulu ledak nuklir yang kredibel secara umum, dan tentunya menunjukkan kekuatan hulu ledak nuklirnya kepada Amerika Serikat serta memberi ancaman. Meski kemudian setelah melaksanakan strateginya, Korea Utara mengalami banyak sanksi, namun objektifitas dari strategi nuklirnya tersebut berjalan dengan lancar.

Lebih lanjut percobaan ledakan nuklir Korea Utara telah memberikan pengaruh terhadap stabilitas keamanan di wilayah Asia Timur. Hal tersebut ditunjukkan dari bagaimana respon Jepang dengan memperbarui kerangka pertahanan nasional dan kerjasama keamanannya bersama Amerika Serikat, Korea Selatan yang mulai menerapkan persenjataan nuklir juga, serta China yang canggung seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Semua bentuk respon atau tindakan dari negara-negara di Asia Timur tersebut menunjukkan perilaku dilema keamanan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa strategi nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin telah mempengaruhi stabilitas keamanan di wilayah Asia Timur, yang ditunjukkan dari respon Jepang, Korea Selatan, dan China yang mengalami dilema keamanan dari deterensi proliferasi nuklir Korea Utara. Strategi nuklir Korea Utara pasca Perang Dingin dengan melakukan proliferasi nuklir pada akhirnya menciptakan kondisi dilema keamanan di wilayah Asia Timur.

### Daftar Pustaka

- Akaha, T. (2005). "Soft power" in japan's security policy: Implications for alliance with the united states. *Pacific Focus*, 20(1), 59–91.
- Azzara, H. N., & Sholeh, B. (2022). A conflict between China and Taiwan: An analysis from a realism perspective. *Journal of Social Studies (JSS)*, ISSN(2), 229–236.
- Badruzaman, I., Jehan, R., & Irsadanar, P. (2020). ASEAN Way in Korean Peninsula Peacebuilding. In *IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies* (Vol. 2).
- Bisley, N. (2008). Securing the "Anchor of Regional Stability"? The Transformation of the US-Japan Alliance and East Asian Security. *Contemporary Southeast Asia*, 30(1), 73–98.
- Burns, R. D., & Coyle III, H. P. E. (2015). *The challenges of nuclear non-proliferation*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Campbell, J. (2021). Seoul's Misguided Desire for a Nuclear Submarine. In *Naval War College Review* (Vol. 74).
- Chang-II, O. (2010). *The Causes of the Korean War, 1950-1953*.
- Choi, J. H. (2019). Advancement of North Korea's Nuclear Weapons and Survivability under the Kim Jong Un Regime: An Assessment based on Nuclear Deterrence Theory. *Journal of the Asia-Japan Research Institute of Ritsumeikan University*, 1, 73–94.
- Dalton, T., & Francis, A. (2015). South Korea's Search for Nuclear Sovereignty. *Asia Policy*, (19), 115–136.
- Delpech, T. (2013). *Nuclear Deterrence in the 21st Century: Lessons from the Cold War for a New Era of Strategic Piracy*.
- Delury, J. (2022). Feudal Contradictions between Communist Allies: Deng Xiaoping, Kim Il-Sung, and the Problem of Succession, 1976–1984. *Journal of Cold War Studies*, 24(2), 4–28.
- Dreicer, M., & Pregoner, A. (2014). Nuclear Arms Control, Nonproliferation, and Counterterrorism: Impacts on Public Health. *American Journal of Public Health*, 104(4).
- Dwivedi, S. S. (2012). North Korea-China Relations: An Asymmetric Alliance. *North Korean Review*, 8(2), 76–93.
- Fetter, S., & Wolfsthal, J. (2018). No first use and credible deterrence. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 1(1), 102–114.
- Fouse, D. (2004). Japan's post-cold war North Korea Policy: hedging toward autonomy? *Asian Affairs: An American Review*, 31(2), 102–120.

- Ha, E., & Hwang, C. (2015). The U.S.-North Korea Geneva Agreed Framework: Strategic Choices and Credible Commitments. *North Korean Review*, 11(1), 7–23.
- Hastings, J. V, Lee, H., & Kelley, R. (2018). North Korea's Lithium Research Networks and its Quest for a Hydrogen Bomb. *Korean Journal of Defense Analysis*, 30(3), 337–352.
- Hughes, C. W. (2007). Implications for the Nuclear Ambitions of Japan, South Korea, and Taiwan. *Asia Policy*, (3), 75–104.
- Kim, K. (2008). Suryong's Direct Rule and The Political Regime in North Korea Under Kim Jong Il. *Asian Perspective*, 32(3), 87–109.
- Kristensen, H. M., & Korda, M. (2022). North Korean nuclear weapons, 2022. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 78(5), 273–294.
- Kristensen, H. M., & Norris, R. S. (2017). A history of US nuclear weapons in South Korea. *Bulletin of the Atomic Scientists*, 73(6), 349–357.
- Lim, E. (2019). South Korea's Nuclear Dilemmas. *Journal for Peace and Nuclear Disarmament*, 2(1), 297–318.
- Mahnken, T. G., & Menon, R. (2001). A Nuclear Strategy for India. In *Naval War College Review* (Vol. 54).
- Makhroja, M. N. (2020). Understanding Juche Ideology Through Psychology of Peace and Conflict in North Korea. *Review of International Relations*, 2(1).
- Mariani, L. (2017). *Assessing North Korea's Nuclear and Missile Programmes: Implications for Seoul and Washington*. JSTOR.
- Miller, S. E. (2020). *Meeting the Challenges of a New Nuclear Age*. 149(2), 17–36.
- Moore, G. J. (2008). How North Korea threatens China's interests: Understanding Chinese "duplicity" on the North Korean nuclear issue. *International Relations of the Asia-Pacific*, 8(1), 1–29.
- Nakato, S. (2013). Japan's Responses to the North Korean Nuclear Crisis: Responsive Engagement Perspectives. *The Journal of East Asian Affairs*, 27(1), 47–74.
- Octamaya, A., Awaru, T., Samsidar, S., Tahir, M., Kaseng, E. S., & Suhaeb, F. W. (2022). Deterrence as a Nuclear Strategy: A Cold War-Era Study. *An Interdisciplinary Journal of Human Theory and Praxis*, 5(1).
- Panda, A. (2020). *Kim Jong Un and the bomb: Survival and deterrence in North Korea*. Oxford University Press.
- Pasyanos, M. E., & Myers, S. C. (2018). The coupled location/depth/yield problem for North Korea's declared nuclear tests. *Seismological Research Letters*, 89(6), 2059–2067.
- Peters, R., Anderson, J., & Menke, H. (2018). *Deterrence in the 21st Century: Integrating Nuclear and Conventional Force* (Vol. 12).
- Przystup, J. J. (2015). *The US-Japan alliance: review of the guidelines for defense cooperation*.
- Puchala, D. J. (2000). International Order and the Future of World Politics. Edited by T. V. Paul and John A. Hall. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. 421p. \$64.95. *American Political Science Review*, 94(3), 773–774.
- Sagan, S. D. (1997). Why Do States Build Nuclear Weapons?: Three Models in Search of a Bomb. In *International Security* (Vol. 21).
- Shin, D. W. (2016). The Rise of the Suryong (Supreme Leader) and the Transfer of Charismatic Leadership. *American Intelligence Journal*, 33(1), 31–48.
- Smith, S. (2016). Alternative North Korean Nuclear Futures. *Non Proliferation Policy Education Center*.
- Sulaiman, V. Z. A. (2020). China's Policy in Refusing North Korea Nuclear Proliferation. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 22(1), 100–124.

- Taylor, W. J., Smith, J. A., & Mazarr, M. J. (1990). US Troop Reductions From Korea, 1970–1990. *The Journal of East Asian Affairs*, 4(2), 256–286.
- Voytan, D. P., Lay, T., Chaves, E. J., & Ohman, J. T. (2019). Yield Estimates for the Six North Korean Nuclear Tests From Teleseismic P Wave Modeling and Intercorrelation of P and Pn Recordings. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 124(5), 4916–4939.
- Winters, R. (2005). Preventing Repeat Offenders: North Korea's Withdrawal and the Need for Revision to the Nuclear Non-Proliferation Treaty. *Vand. J. Transnat'l L.*, 38, 1499.